



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025



Alamat

📍 Palangka Raya
Jl. Williém AS No. 08

Kontak

☎ (0536) 3223756
📍 dlh@kalteng.go.id
🌐 dlh.kalteng.go.id



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)
TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PALANGKA RAYA

2025



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/253/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, maka perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870)
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 115);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
 - g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
 - j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;

- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- jj. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- kk. Rumah Sakit Umum Daerah Hanau;
- ll. Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah;
- mm. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- nn. Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah;
- oo. Biro Hukum Provinsi Kalimantan Tengah;
- pp. Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- qq. Biro Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- rr. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ss. Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- tt. Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- uu. Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang telah ditetapkan, menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 09 Juli 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIAR SABRAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri:
u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
u.p. a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;
c. Asisten Administrasi Umum; dan
d. Kepala Biro Hukum
3. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk diketahui.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan anugrah-Nya lah penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini dapat terselesaikan. P-Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 merupakan salah satu bagian dari substansi perencanaan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta sinkronisasi dari Perencanaan Strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dilakukan berdasarkan dinamika yang terjadi pada pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 sampai dengan triwulan kedua Tahun 2025, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memandang perlu untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2025. Hal tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renja DLH Prov. Kalteng ini disusun dengan mengacu pada beberapa dokumen perencanaan antara lain RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, Renstra DLH Tahun 2021-2026 dan hasil evaluasi kinerja terhadap capaian pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Secara umum, DLH Prov. Kalteng telah dapat melaksanakan program/kegiatan dalam rentang waktu tersebut. Namun demikian mengingat keterbatasan yang dimiliki DLH Prov. Kalteng dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati DLH Prov. Kalteng membuka diri terhadap berbagai masukan ataupun saran, demi tercapainya perencanaan pembangunan yang lebih baik

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Perubahan Renja DLH Prov. Kalteng Tahun 2025 ini.

Palangka Raya, 31 Juli 2025

KEPALA DINAS,



JONI HARTA, S.E, S.Hut. M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19760602 200501 1 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA PD	6
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	19
2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	48
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	48
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD.....	49
3.3 Program dan Kegiatan	49
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH...	61
BAB V PENUTUP	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup, serta sebagai salah satu pendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 28 Tahun 2025 Tanggal 12 Juni 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan

kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;

- d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Lingkungan Hidup, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102).

23. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 37).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan sektor lingkungan hidup yang kemudian dijabarkan dalam rencana program/kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2025 dan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DLH Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 agar sesuai dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan DLH Prov. Kalteng pada khususnya dan arah pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA PD

BAB III TUJUAN DAN SASASAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra

Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2025 mengacu pada tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Program Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 sebanyak 11 Program, 21 Kegiatan dan 73 sub kegiatan yaitu:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, 8 (delapan) kegiatan terdiri dari:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
- 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
 - 3) Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- II. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, 2 (dua) kegiatan terdiri dari:
1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi, 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
 - 2) Penyusunan RPPLH Provinsi
 2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi, 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pembinaan Penyelenggaraan KLHS
 - 2) Pemantauan dan Evaluasi KLHS
- III. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, 2 (dua) kegiatan terdiri dari:
1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, 11 (sebelas) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 - 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
 - 3) Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan
 - 4) Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Provinsi

- 5) Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 - 6) Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 - 7) Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan profil emisi GRK
 - 8) Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah
 - 9) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan di Provinsi
 - 10) Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Pemantau Kualitas Lingkungan di Provinsi
 - 11) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
2. Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup, 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
- IV. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), 1 (satu) kegiatan terdiri dari:
1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi, 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - 2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - 3) Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati
- V. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), 1 (satu) kegiatan terdiri dari:
1. Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
- VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), 1 (satu) kegiatan terdiri dari:
1. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, 4 (empat) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - 2) Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
 - 3) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah

4) Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

VII. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Terkait Dengan PPLH, 2 (dua) kegiatan terdiri dari:

1. Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
2. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH.

VIII. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, 1 (satu) kegiatan terdiri dari:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi, 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
 - 2) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
 - 3) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat

IX. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, 1 (satu) kegiatan terdiri dari:

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat, 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

X. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, 1 (satu) kegiatan terdiri dari:

1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi, 5 (lima) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi
 - 2) Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah
 - 3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi

- 4) Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi
- 5) Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi

XI. Program Pengelolaan Persampahan, 1 (satu) kegiatan terdiri dari:

1. Penanganan Sampah di TPA / TPST Regional, 5 (lima) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
 - 2) Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi
 - 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Regional
 - 4) Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi
 - 5) Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 050/009/TAPD/2025 tanggal 15 April 2025 tentang Pergeseran/Refocussing Kegiatan Tahun Anggaran 2025, terdapat efisiensi pengurangan pagu anggaran yang semula sebesar Rp 159.244.614.919 menjadi Rp 156.346.045.467.

Realisasi program/kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 s/d triwulan II yaitu realisasi keuangan sebesar 8,12 % dan realisasi fisik 41,77 %.

Secara umum seluruh rencana program dan kegiatan tahun 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah belum semua dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

**TABEL 2.1. EVALUASI HASIL RENJA-PD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/(Kegiatan (output)	Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023 11=10/5*100%		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		12		
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1.	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keterlaksanaan (%)	100	%	39.201.024.059	25	3.982.273.718	50	9.016.285.763					50	9.016.285.763	50,00	23,00	DLH
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	9	Dokumen	474.750.872	5	58.113.250	7	77.040.750					7	77.040.750	77,78	16,23	DLH
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	382.161.568	0	39.118.000	3	43.915.500					3	43.915.500	75,00	11,49	DLH
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	8.574.925	0	0	0	0					0	0	0,00	0,00	DLH
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	8.574.925	0	0	1	0					1	0	100,00	0,00	DLH
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	10.000.000	0	4.995.000	0	4.995.000					0	4.995.000	0,00	49,95	DLH
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	10.000.000	0	0	0	0					0	0	0,00	0,00	DLH
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	42.420.958	3	14.000.250	4	20.360.250					4	20.360.250	100,00	48,00	DLH
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	13.018.496	0	0	0	7.770.000					0	7.770.000	0,00	59,68	DLH
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan PD	100	%	12.485.030.717	25	2.373.419.948	50	4.943.243.379					50	4.943.243.379	50,00	39,59	DLH
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64	Orang/Bulan	12.462.879.675	64	2.372.169.948	64	4.940.322.379					64	4.940.322.379	100,00	39,64	DLH
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	10.378.848	0	0	0	1.121.000					0	1.121.000	0,00	10,80	DLH
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2	Laporan	11.772.194	0	1.250.000	0	1.800.000					0	1.800.000	0,00	15,29	DLH
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100	%	34.289.419	25	1.650.000	50	13.725.000					50	13.725.000	50,00	40,03	DLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome(/Kegiatan (output)	Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						I		II		III		IV			11=10/5*100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		K	Rp	12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	16.438.566	0	1.650.000	1	5.050.000				1	5.050.000	100,00	30,72	DLH
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	17.850.853	0	0	0	8.675.000				0	8.675.000	0,00	48,60	DLH
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian PD (%)	100	%	2.371.860.871	25	4.675.000	50	392.575.000				50	392.575.000	50,00	16,55	DLH
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5	Paket	450.000.000	1	0		0					0	0,00	0,00	DLH
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	10.000.000	0	4.675.000	0	9.660.000				0	9.660.000	0,00	96,60	DLH
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	250	Orang	1.911.860.871	50	0	100	382.915.000				100	382.915.000	40,00	20,03	DLH
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum PD	100	%	3.675.900.000	25	525.458.570	50	1.061.828.610				50	1.061.828.610	50,00	28,89	DLH
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	200.000.000	0	26.570.000	0	70.541.000				0	70.541.000	0,00	35,27	DLH
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	2.892.900.000	0	426.800.000	3	758.545.250				3	758.545.250	30,00	26,22	DLH
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	40.000.000	1	1.000.000	1	16.800.000				1	16.800.000	100,00	42,00	DLH
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	150.000.000	0	17.880.000	0	39.700.000				0	39.700.000	0,00	26,47	DLH
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	25.000.000	0	4.849.000	0	11.609.000				0	11.609.000	0,00	46,44	DLH
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	315.000.000	0	48.359.570	0	164.633.360				0	164.633.360	0,00	52,26	DLH
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	53.000.000	0	0	0	0				0	0	0,00	0,00	DLH
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterlaksanaan pengadaan barang milik daerah	100	%	12.673.410.792	25	550.000.000	50	1.313.400.000				50	1.313.400.000	50,00	10,36	DLH
		Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	7	unit	3.900.000.000	2	550.000.000	3	1.313.400.000				3	1.313.400.000	42,86	33,68	DLH
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	Paket	400.000.000	0	0	0	0				0	0	0,00	0,00	DLH
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	Unit	7.873.410.792	0	0	0	0				0	0	0,00	0,00	DLH
		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	Unit	500.000.000	0	0	0	0				0	0	0,00	0,00	DLH
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan PD	100	%	3.110.000.000	25	400.047.950	50	897.762.440				50	897.762.440	50,00	28,87	DLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/(Kegiatan (output)	Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						I		II		III		IV			11=10/5*100%				
						6		7		8		9			10				
1	2	3	4	5		K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	10.000.000	0	1.600.000	0	4.000.000					0	4.000.000	0,00	40,00	DLH
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	600.000.000	0	54.286.950	0	113.981.675					0	113.981.675	0,00	19,00	DLH
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	Laporan	2.500.000.000	0	344.161.000	0	779.780.765					0	779.780.765	0,00	31,19	DLH
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peresentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PD	100	%	4.375.781.388	25	68.909.000	50	316.710.584					50	316.710.584	50,00	7,24	DLH
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20	Unit	500.000.000	20	58.609.000	20	92.364.000					20	92.364.000	100,00	18,47	DLH
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	3.065.781.388	0	0	0	208.846.584					0	208.846.584	0,00	6,81	DLH
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	810.000.000	0	10.300.000	0	15.500.000					0	15.500.000	0,00	1,91	DLH
		2.	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen rencana dan perlindungan di Bidang Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	2	Dokumen	784.255.058	0	0	0	32.634.600					0	32.634.600	0,00
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH	1	Dokumen	724.506.782	0	0	0	28.598.000					0	28.598.000	0,00	3,95	DLH
		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1	Dokumen	332.365.436	0	0	0	24.050.000					0	24.050.000	0,00	7,24	DLH
		Penyusunan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	1	Dokumen	392.141.346	0	0	0	4.548.000					0	4.548.000	0,00	1,16	DLH
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen KLHS	1	Dokumen	59.748.276	0	0	0	4.036.600					0	4.036.600	0,00	6,76	DLH
		Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	6	Dokumen	37.875.898	0	0	0	4.036.600					0	4.036.600	0,00	10,66	DLH
		Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	3	Dokumen	21.872.378	0	0	1	0					1	0	33,33	0,00	DLH
3.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	IKLH	74,97	poin	11.225.785.179	0	68.607.472		416.991.152					416.991.152	0,00	3,71	DLH	
		Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	10	Kegiatan	11.116.680.783		68.607.472	7	320.171.152					7	320.171.152	70,00	2,88	DLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/(Kegiatan (output)	Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						I		II		III		IV			11=10/5*100%				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		12			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2	Dokumen	380.183.589	0	68.607.472	0	134.242.972					0	134.242.972	0,00	35,31	DLH
		Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1	Dokumen	113.785.134	0	0	0	56.610.500					0	56.610.500	0,00	49,75	DLH
		Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	1	Paket	34.448.381	0	0	1	257.500					1	257.500	100,00	0,75	DLH
		Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1	Laporan	66.200.518	0	0	0	0					0	0	0,00	0,00	DLH
		Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	2	Laporan	800.475.312	0	0	1	18.880.000					1	18.880.000	50,00	2,36	DLH
		Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, udara dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	12	Lokasi	237.412.254	0	0	6	8.730.000					6	8.730.000	50,00	3,68	DLH
		Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1	Dokumen	154.245.150	0	0	0	0					0	0	0,00	0,00	DLH
		Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1	Dokumen	32.264.474	0	0	0	2.702.750					0	2.702.750	0,00	8,38	DLH
		Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	15	Unit	8.270.000.000	0	0	0	0					0	0	0,00	0,00	DLH
		Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan	1	Unit	390.239.252	0	0	0	0					0	0	0,00	0,00	DLH
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	60	Dokumen	637.426.719	15	0	10	98.747.430					10	98.747.430	16,67	15,49	DLH
		Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan upaya penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	1	Kegiatan	109.104.396	0	0	1	96.820.000					1	96.820.000	100,00	88,74	DLH
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1	Laporan	109.104.396	0	0	1	96.820.000					1	96.820.000	100,00	88,74	DLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome(/Kegiatan (output)	Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						I		II		III		IV			11=10/5*100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		K	Rp	12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah dokumen profil Kehati	1	Dokumen	14.737.028.793	0	0	24.240.400					0	24.240.400	0,00	0,16	DLH
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati provinsi	1	Kegiatan	14.737.028.793	0	0	24.240.400					0	24.240.400	0,00	0,16	DLH
		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1	Dokumen	13.102.545.120	0	0	24.240.400					0	24.240.400	0,00	0,19	DLH
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1	Hektar	128.095.286	0	0	0					0	0	0,00	0,00	DLH
		Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekargaman hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	50,00	Orang	1.506.388.387	0	0	0					0	0	0,00	0,00	DLH
5.	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	1.407.674,88	ton	1.190.076.667	382,3496	51.900.000	174.931,98	98.260.410				#####	98.260.410	12,43	8,26	DLH
		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah usaha jasa pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1	Usaha	1.190.076.667	0	51.900.000	0	98.260.410				0	98.260.410	0,00	8,26	DLH
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	533.349.177	0	0	0					0	0	0,00	0,00	DLH
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	100	Dokumen	656.727.490	0	51.900.000	0	98.260.410				0	98.260.410	0,00	14,96	DLH
6.	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	79	%	1.368.139.064	33,333333	372.506.800	16,67	952.095.639				16,67	952.095.639	21,10	69,59	DLH
		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi	162	Perusahaan	1.368.139.064	21	372.506.800	42	952.095.639				42	952.095.639	25,93	69,59	DLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							I		II		III		IV			10			K
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11=10/5*100%		12
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	2	Dokumen	320.902.804	0	267.016.800	1	267.016.800					1	267.016.800	50,00	83,21	DLH
		Pengembangan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	5	Orang	249.938.058	0	0	5	212.217.650					5	212.217.650	100,00	84,91	DLH
		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	162	Badan Usaha	769.148.000	21	105.490.000	42	457.268.424					42	457.268.424	25,93	59,45	DLH
		Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	9	Orang	28.150.202	0	0	9	15.592.765					9	15.592.765	100,00	55,39	DLH
		7.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	2	MHA	176.549.653	0	3.308.241	0	31.813.741				0	31.813.741	0,00	18,02
		Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang terbentuk, diakui dan menjalankan kearifan lokal serta pengetahuan tradisional yang terkait dengan PPLH	2	MHA	126.188.220	0	1.438.441	0	1.438.441				0	1.438.441	0,00	1,14	DLH	
		Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1	Dokumen	126.188.220	0	1.438.441	0	1.438.441				0	1.438.441	0,00	1,14	DLH	
		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	1	Kelompok Masyarakat	50.361.433	0	1.869.800	1	30.375.300				1	30.375.300	100,00	60,31	DLH	
		Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1	Dokumen	50.361.433	0	1.869.800	1	30.375.300				1	30.375.300	100,00	60,31	DLH	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/(Kegiatan (output)	Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						I		II		III		IV			11=10/5*100%				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		K	Rp	12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
8.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	2	Kegiatan	2.127.207.948	0	0	1	272.502.000					1	272.502.000	50,00	12,81	DLH
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi	2	Kegiatan	2.127.207.948	0	0	1	272.502.000					1	272.502.000	50,00	12,81	DLH
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	Dokumen	623.723.250	0	0	1	74.457.000					1	74.457.000	100,00	11,94	DLH
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	60	Orang	417.244.933	0	0	60	198.045.000					60	198.045.000	100,00	47,46	DLH
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok	2	Lembaga	1.086.239.765	0	0	1	0					1	0	50,00	0,00	DLH
9.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	2	Penghargaan an	477.814.401	0	2.889.600	0	3.364.600				0	3.364.600	0,00	0,70	DLH	
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang didapat oleh masyarakat/ lembaga masyarakatat/dunia usaha	2	Penghargaan an	477.814.401	0	2.889.600	0					0	3.364.600	0,00	0,70	DLH	
		Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai	5	Entitas	477.814.401	0	2.889.600	0	3.364.600				0	3.364.600	0,00	0,70	DLH	
10.	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	88	%	1.068.676.433	0	0	100	10.020.500				100	10.020.500	113,64	0,94	DLH	
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah pengaduan yang ditangani	100	%	1.068.676.433	0	0	100	10.020.500				100	10.020.500	100,00	0,94	DLH	
		Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	1	Perkara	109.141.268	0	0	2	0				2	0	200,00	0,00	DLH	
		Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	12	Orang	244.887.654	0	0	0	0				0	0	0,00	0,00	DLH	
		Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	1	Perkara	247.302.486	0	0		6.660.500					6.660.500	0,00	2,69	DLH	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						I		II		III		IV				11=10/5*100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/5*100%		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
		Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	1	Perkara	336.470.822	0	0	0	3.360.000					0	3.360.000	0,00	1,00	DLH
		Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	8	Pengaduan	130.874.203	0	0	3	0					3	0	37,50	0,00	DLH
11.	Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang	18.636,55	Ton	83.989.488.212	0	558.955.000	1878,05	1.835.354.828					1878,05	1.835.354.828	10,08	2,19	DLH
		Penanganan Sampah di TPA / TPST Regional	Jumlah Kegiatan Penangan Sampah	1	Kegiatan	83.989.488.212	1	558.955.000	1	1.835.354.828					1	1.835.354.828	100,00	2,19	DLH
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1	Dokumen	50.237.656	0	0	0	0					0	0	0,00	0,00	DLH
		Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	1	Dokumen	1.200.000.000	0	0	0	0					0	0	0,00	0,00	DLH
		Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	1	Unit	75.628.772.588	0	0	0	0					0	0	0,00	0,00	DLH
		Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	866,03	ton	6.964.841.000	304,6	558.955.000	692,413	1.835.354.828					692,413	1.835.354.828	79,95	26,35	DLH
		Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1	Dokumen	145.636.968	0	0	0	0					0	0	0,00	0,00	DLH
		JUMLAH				156.346.045.467		5.040.440.831		12.693.563.633						12.693.563.633			
Rata-rata capaian kinerja (%)																8,12			
Predikat kinerja																sangat rendah			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Pelaksanaan tugas kesekretariatan.
- b. Perumusan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- c. Perencanaan program di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- d. Pengkoordinasian di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- e. Pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- f. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD, mengacu dari Target Renstra SKPD dibandingkan dengan realisasi capaian SKPD. Tabel Capaian Kinerja Pelayanan dapat dilihat pada tabel 2.2

**TABEL 2.2. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025 memakai nilai dan angka target
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			74,53 Poin	74,75 Poin	74,97 Poin	75,16 Poin	74,17 Poin	74,75 Poin	74,97 Poin	75,16 Poin	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025 memakai nilai dan angka target
3	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton).			1.407.274,777 ton	1.407.474,827 ton	1.407.674,877 ton	1.407.874,927 ton	1.232.759,88 ton	1.407.474,827 ton	1.407.674,877 ton	1.407.874,927 ton	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025 memakai nilai dan angka target
4	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)			77,00%	78,00%	79,00%	80,00%	39,20%	78,00%	79,00%	80,00%	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025 memakai nilai dan angka target
5	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)			86,00%	87,00%	88,00%	89,00%	100,00%	87,00%	88,00%	89,00%	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025 memakai nilai dan angka target
6	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH			2 MHA	2 MHA	2 MHA	2 MHA	1 MHA	2 MHA	2 MHA	2 MHA	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025 memakai nilai dan angka target
7	Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan			2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025 memakai nilai dan angka target
8	Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat			2 Penghargaan	2 Penghargaan	2 Penghargaan	2 Penghargaan	2 Penghargaan	2 Penghargaan	2 Penghargaan	2 Penghargaan	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025 memakai nilai dan angka target

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
9	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang (ton)			18.090,23 ton	18.271,13 ton	18.636,55 ton	18.822,92 ton	23.191,61 ton	18.271,13 ton	18.636,55 ton	18.822,92 ton	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025 memakai nilai dan angka target
10	Nilai Kepuasan Masyarakat			82 Nilai	83 Nilai	84 Nilai	85 Nilai	82,35 Nilai	83 Nilai	84 Nilai	85 Nilai	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025 memakai nilai dan angka target

2.3. Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tidak terlepas dari dokumen perencanaan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan Renstra. Dalam penyusunan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup, pencapaian visi misi Provinsi Kalimantan Tengah menjadi salah satu fokus dan tujuan utama yang harus dipenuhi. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, salah satu misi yakni misi ke-1 (satu) merupakan misi yang sangat terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu perangkat daerah pendukung dalam upaya pencapaiannya. Misi dimaksud adalah **"Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan"**. Tujuan dari misi tersebut adalah **Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**. Sasaran dan indikator sasaran yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari tujuan tersebut yaitu **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)**. Sasaran tersebut menjadi tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

Isu-isu lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, secara umum meliputi:

- a. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- b. Pelestarian lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagaimana telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026, isu-isu penting yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah meliputi :

- a. Tingginya alih fungsi lahan

Tingginya alih fungsi lahan menyebabkan deforestasi dan banjir berbagai kegiatan investasi di sektor perkebunan, pertambangan dan kehutanan serta aktifitas masyarakat menyebabkan tekanan terhadap laju perubahan tutupan lahan di Kalimantan Tengah. Hasil analisis spasial terhadap perubahan tutupan lahan dari Tahun 2018 dan 2019 menunjukkan bahwa luasan areal tutupan lahan Hutan Lahan Kering Primer berkurang seluas -5.502,17 Ha, tutupan lahan Hutan Lahan Kering Sekunder 43.667,50 Ha, sedangkan areal perkebunan bertambah seluas +146.411,56 Ha selama 1 tahun. Perubahan tutupan lahan ini berdampak terhadap penurunan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKTLH pada Tahun 2018 sebesar 78,12 sedangkan pada Tahun 2019 turun menjadi 76,27. Indeks Kualitas Tutupan Lahan untuk Tahun 2015 sampai tahun 2017 tidak dapat dievaluasi dengan kondisi IKTL Tahun 2018 dan 2019 karena rumus perhitungannya mengalami perubahan. Dampak lingkungan yang terjadi akibat perubahan lahan ini adalah peningkatan pada saat hujan sehingga mengakibatkan volume air limpasan meningkat dan berdampak pada banjir di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah. Selain dampak banjir, perubahan tutupan lahan ini mengakibatkan peningkatan erosi. Tanah yang ikut terbawa aliran hujan akan masuk ke badan air, sehingga berdampak terhadap pendangkalan alur pelayaran di beberapa Sungai di Kalimantan Tengah.

b. Kerusakan Fungsi Ekosistem Gambut

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 35 unit KHG dengan luas 4.733.540 ha sesuai SK Menteri LHK No. SK. 130/MenLHK/Setjen/PKL.0/2/2017. KHG tersebar di 11 kabupaten/kota dan KHG terluas berada di KHG S. Katingan – S. Sebangau, yaitu 862.240 ha (18,21%). Sedangkan kabupaten yang memiliki dataran gambut terluas adalah Kabupaten Pulang Pisau seluas 933.815 ha atau 19,75% dari total luas gambut di Kalimantan Tengah. Secara umum 35 unit KHG memiliki tutupan lahan yang didominasi oleh hutan rawa seluas 851.134 ha, semak belukar seluas 774.730 ha, dan hutan mangrove primer seluas 297.315 ha.

Di Provinsi Kalimantan Tengah telah terindikasi adanya kerusakan ekosistem gambut yang didominasi oleh kerusakan ringan dengan luasan 1.906.740 ha (89,71 %) pada fungsi Budidaya Ekosistem gambut dan 2.467.182 ha (94,64 %) pada fungsi lindung ekosistem Gambut. Area yang mengalami kerusakan (rusak berat) pada fungsi budidaya ekosistem gambut 28.204 ha dan pada fungsi lindung ekosistem gambut 18.385 ha. Sedangkan area yang tidak rusak masing-masing seluas 14.508 ha (FBEG) dan 2.497 ha (FLEG).

c. Pencemaran air akibat buangan limbah domestik, industri dan pertanian

Faktor pemicu terjadinya penurunan kualitas air di Kalimantan Tengah adalah meningkatnya pertumbuhan penduduk, meningkatnya usaha/kegiatan industri pengolahan dan ekstraktif, rendahnya anggaran pengawasan serta masih minimnya sarana pengolahan limbah domestik dari rumah tangga di perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk akan memicu pada peningkatan volume limbah domestik dan menjadi peningkatan volume limbah domestik dan menjadi penyebab peningkatan beban pencemaran di sungai.

Selain itu yang memengaruhi penurunan kualitas air adalah limbah dari pabrik pengolahan kelapa sawit, pertambangan, penggunaan pupuk & pestisida. Data tahun 2019 menunjukkan ada 104 unit pabrik pengolahan TBS kelapa sawit dengan kapasitas 6.488 ton per jam dan 2 unit pengolahan CPO menjadi minyak goreng dengan kapasitas 3.000 ton per jam. Pabrik pengolahan ini tersebar di hampir semua kabupaten. Penggunaan pupuk di perkebunan besar kelapa sawit akan mempengaruhi kualitas air baik air tanah ataupun air permukaan. Saat ini ada telah tertanam lebih dari 1,7 ha oleh tanaman kelapa sawit dan karet. Penggunaan pupuk nitrogen dan fosfor yang tidak hati-hati akan dapat mencemari sumber air dan perairan. Demikian juga limbah pengolahan pertambangan baik yang dilakukan oleh pemegang izin usaha pertambangan ataupun pertambangan rakyat dapat mempengaruhi kualitas air. Akibat dari tekanan terhadap penurunan kualitas air yang cukup tinggi, berdampak pada penurunan kualitas air, hal ini ditunjukkan dari nilai IKA (Indeks Kualitas Air). Parameter Kualitas Air, yang diukur dalam penentuan IKA adalah TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform. Nilai IKA Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sebesar 61,15 (cukup baik) dan Tahun 2019 sebesar 56,80 (kurang baik).

d. Rendahnya pengelolaan persampahan

Perkembangan perkotaan di Kalimantan Tengah cukup signifikan karena banyaknya aktivitas ekonomi dan pemerintahan yang terkonsentrasi di kota provinsi ataupun kabupaten/kota. Konsekuensi dari konsentrasi penduduk di perkotaan ini tentunya akan menimbulkan dampak lingkungan. Penduduk Kalimantan Tengah tahun 2019 mencapai 2.605.274 jiwa dengan 498.688 rumah tangga. Konsentrasi penduduk terbesar terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kapuas, Kotawaringin Barat dan Palangka Raya. Kepadatan penduduk masih sangat kecil yaitu 17 jiwa per km². Kabupaten terpadat adalah Palangka Raya dengan nilai 115 jiwa per km².

Berdasarkan data proyeksi penduduk dari BPS di atas, dan asumsi jumlah sampah yang dihasilkan sebanyak 0,7 kg/orang/hari maka jumlah sampah di Kalimantan Tengah perhari yang dihasilkan pada tahun 2018 sebanyak 1.862,25 ton/hari sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 1.900,40 ton/hari.

Permasalahan sampah ini berdampak pada terbentuknya kawasan- kawasan kumuh di perkotaan. Data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah (Disperkimtan) terdapat 111 kawasan kumuh yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan luasan mencapai 6.998 Ha. Terkait dengan masalah persampahan, pada tahun 2018 hanya ada 2 (dua) dari 14 kabupaten/kota yang mampu memperoleh penghargaan ADIPURA, yaitu Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di perkotaan masih belum maksimal dan terlaksana dengan baik.

Isu-isu penting tersebut di atas menjadi fokus penanganan dan menjadi dasar perencanaan dalam penentuan/penetapan program kegiatan prioritas yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 disusun sesuai dengan visi misi gubernur Kalimantan Tengah. Oleh karena itu program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup juga menyesuaikan tema tersebut guna mendukung pencapaian visi misi daerah, khususnya untuk pencapaian misi ke 1 (satu) sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Review terhadap rancangan awal Perubahan RKPD Tahun 2025 secara rinci disajikan dalam tabel 2.3. Pada tabel tersebut disampaikan perbandingan antara rencana program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam perubahan RKPD dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah.

**TABEL 2.3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase keterlaksanaan (%)	100%	35.423.963.027	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase keterlaksanaan (%)	100%	35.423.963.027	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	9 Dokumen	474.750.872	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	9 Dokumen	474.750.872	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	382.161.568	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	382.161.568	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.574.925	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.574.925	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.574.925	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.574.925	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	42.420.958	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	42.420.958	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	13.018.496	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	13.018.496	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi keuangan PD	100%	12.485.030.717	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi keuangan PD	100%	12.485.030.717	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palangka Raya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/Bulan	12.462.879.675	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palangka Raya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/Bulan	12.462.879.675	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.378.848	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.378.848	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	11.772.194	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	11.772.194	
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	34.289.419	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	34.289.419	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	16.438.566	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	16.438.566	
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	17.850.853	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	17.850.853	
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian PD (%)	100%	2.023.174.271	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian PD (%)	100%	2.023.174.271	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Palangka Raya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	101.313.400	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Palangka Raya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	101.313.400	
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.000.000	
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	250 Orang	1.911.860.871	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	250 Orang	1.911.860.871	
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum PD	100%	1.988.525.568	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum PD	100%	1.988.525.568	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	1.328.525.568	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	1.328.525.568	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palangka Raya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palangka Raya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	150.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	150.000.000	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.000.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah dan Luar Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	315.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah dan Luar Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	315.000.000	
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	30.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	30.000.000	
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase keterlaksanaan pengadaan barang milik daerah	100%	11.498.410.792	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase keterlaksanaan pengadaan barang milik daerah	100%	11.498.410.792	
1	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kota Palangka Raya	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	5 unit	3.600.000.000	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kota Palangka Raya	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	5 unit	3.600.000.000	
2	Pengadaan Mebel	Kota Palangka Raya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	175.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Palangka Raya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	175.000.000	
3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	7.673.410.792	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	7.673.410.792	
G	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	
1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan PD	100%	2.794.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan PD	100%	2.794.000.000	
2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	450.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	450.000.000	
H	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.334.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.334.000.000	
1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Peresentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PD	100%	4.125.781.388	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Peresentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PD	100%	4.125.781.388	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palangka Raya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	450.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palangka Raya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	450.000.000	
II	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	2.865.781.388	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	2.865.781.388	
A	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	810.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	810.000.000	
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Jumlah dokumen rencana dan perlindungan di Bidang Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	2 Dokumen	784.255.058	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Jumlah dokumen rencana dan perlindungan di Bidang Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	2 Dokumen	784.255.058	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		Jumlah dokumen RPPLH	1 Dokumen	724.506.782	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		Jumlah dokumen RPPLH	1 Dokumen	724.506.782	
B	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	332.365.436	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	332.365.436	
1	Penyusunan RPPLH Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	1 Dokumen	392.141.346	Penyusunan RPPLH Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	1 Dokumen	392.141.346	
2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Jumlah dokumen KLHS	1 Dokumen	59.748.276	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Jumlah dokumen KLHS	1 Dokumen	59.748.276	
3	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	6 Dokumen	37.875.898	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	6 Dokumen	37.875.898	
III	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	3 Dokumen	21.872.378	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	3 Dokumen	21.872.378	
A	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		IKLH	74,97	10.406.294.679	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		IKLH	74,97	10.406.294.679	
1	Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah Kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	10 Kegiatan	10.297.190.283	Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah Kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	10 Kegiatan	10.297.190.283	

No	Rancangan Akhir RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	380.183.589	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	380.183.589	
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	113.785.134	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	113.785.134	
4	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	1 Paket	34.448.381	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	1 Paket	34.448.381	
5	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan	66.200.518	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan	66.200.518	
6	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	2 Laporan	800.475.312	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	2 Laporan	800.475.312	
7	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, udara dan Laut	Provinsi Kalimantan Tengah	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	12 Lokasi	237.412.254	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, udara dan Laut	Provinsi Kalimantan Tengah	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	12 Lokasi	237.412.254	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
8	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen	154.245.150	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen	154.245.150	
9	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	29.789.474	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	29.789.474	
10	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	15 Unit	7.452.984.500	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	15 Unit	7.452.984.500	
B	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	390.239.252	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	390.239.252	
1	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	60 Dokumen	637.426.719	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	60 Dokumen	637.426.719	
VI	Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah kegiatan upaya penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	1 Kegiatan	109.104.396	Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah kegiatan upaya penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	1 Kegiatan	109.104.396	
A	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	109.104.396	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	109.104.396	

No	Rancangan Akhir RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Jumlah dokumen profil Kehati	1 Dokumen	14.737.028.793	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Jumlah dokumen profil Kehati	1 Dokumen	14.737.028.793	
2	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		Jumlah kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati provinsi	1 Kegiatan	14.737.028.793	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		Jumlah kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati provinsi	1 Kegiatan	14.737.028.793	
3	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	13.102.545.120	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	13.102.545.120	
VII	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Provinsi Kalimantan Tengah	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 Hektar	128.095.286	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Provinsi Kalimantan Tengah	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 Hektar	128.095.286	
A	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	50 Orang	1.506.388.387	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	50 Orang	1.506.388.387	
1	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	1.407.674,877 ton	560.250.704	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	1.407.674,877 ton	560.250.704	
VIII	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah usaha jasa pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 Usaha	560.250.704	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah usaha jasa pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 Usaha	560.250.704	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
A	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	3.349.177	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	3.349.177	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen	556.901.527	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen	556.901.527	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	79%	1.368.139.064	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	79%	1.368.139.064	
3	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi	162 Perusahaan	1.368.139.064	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi	162 Perusahaan	1.368.139.064	
IX	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	2 Dokumen	320.902.804	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	2 Dokumen	320.902.804	
A	Pengembangan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	249.938.058	Pengembangan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	249.938.058	
1	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	162 Badan Usaha	769.148.000	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	162 Badan Usaha	769.148.000	

No	Rancangan Akhir RCPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
X	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	9 Orang	28.150.202	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	9 Orang	28.150.202	
A	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA TERKAIT DENGAN PPLH		Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	2 MHA	176.549.653	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA TERKAIT DENGAN PPLH		Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	2 MHA	176.549.653	
1	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Jumlah MHA yang terbentuk, diakui dan menjalankan kearifan lokal serta pengetahuan tradisional yang terkait dengan PPLH	2 MHA	126.188.220	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Jumlah MHA yang terbentuk, diakui dan menjalankan kearifan lokal serta pengetahuan tradisional yang terkait dengan PPLH	2 MHA	126.188.220	
XI	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1 Dokumen	126.188.220	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1 Dokumen	126.188.220	
A	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Jumlah kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	1 Kelompok Masyarakat	50.361.433	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Jumlah kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	1 Kelompok Masyarakat	50.361.433	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	50.361.433	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	50.361.433	
2	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	2 Kegiatan	1.390.852.928	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	2 Kegiatan	1.390.852.928	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi	2 Kegiatan	1.390.852.928	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi	2 Kegiatan	1.390.852.928	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	223.723.250	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	223.723.250	
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	60 Orang	471.101.913	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	60 Orang	471.101.913	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2 Lembaga	696.027.765	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2 Lembaga	696.027.765	
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	2 Penghargaan	476.588.333	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	2 Penghargaan	476.588.333	
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat		Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang didapat oleh masyarakat/ lembaga masyarakatat/dunia usaha	2 Penghargaan	476.588.333	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat		Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang didapat oleh masyarakat/ lembaga masyarakatat/dunia usaha	2 Penghargaan	476.588.333	
	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	2 Entitas	476.588.333	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	2 Entitas	476.588.333	
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	88%	1.068.676.433	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	88%	1.068.676.433	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Jumlah pengaduan yang ditangani	100%	1.068.676.433	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Jumlah pengaduan yang ditangani	100%	1.068.676.433	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	1 Perkara	109.141.268	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	1 Perkara	109.141.268	
	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	12 Orang	244.887.654	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	12 Orang	244.887.654	
	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	1 Perkara	247.302.486	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	1 Perkara	247.302.486	
	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	1 Perkara	336.470.822	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	1 Perkara	336.470.822	
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	8 Pengaduan	130.874.203	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	8 Pengaduan	130.874.203	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	18.636,55 Ton	83.674.577.042	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	18.636,55 Ton	83.674.577.042	
	Penanganan Sampah di TPA/ TPST Regional		Jumlah Kegiatan Penangan Sampah	1 Kegiatan	83.674.577.042	Penanganan Sampah di TPA/ TPST Regional		Jumlah Kegiatan Penangan Sampah	1 Kegiatan	83.674.577.042	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 Dokumen	50.237.656	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 Dokumen	50.237.656	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	1.200.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	1.200.000.000	
	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	1 Unit	75.628.772.588	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	1 Unit	75.628.772.588	
	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	866,03 ton	6.649.929.830	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	866,03 ton	6.649.929.830	
	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1 Dokumen	145.636.968	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1 Dokumen	145.636.968	
	JUMLAH				150.067.175.714	JUMLAH				150.067.175.714	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Untuk menyusun RKPD, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang.

Selanjutnya sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, salah satunya mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, salah satunya melalui perencanaan daerah. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah diwujudkan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi serta nasional.

Musrenbang merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Selain sebagai wahana untuk mensinkronkan dan merekonsiliasikan pendekatan *top-down* dengan *bottom-up*, musrenbang juga merupakan wahana untuk pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat dengan penilaian yang bersifat teknis, resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan non *government stakeholders* untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan.

Dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renja, telah dilakukan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, sampai dengan provinsi termasuk penyelenggaraan Forum PD dan/atau Gabungan PD. Usulan kegiatan sesuai hasil Musrenbang secara lengkap dirinci pada tabel 2.4.

TABEL 2.4. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 / KEGIATAN MUSREMBANG TAHUN 2024

PD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kepala Desa Wungkur Nanakan	Kelurahan / Desa	Tingginya alih fungsi lahan	Alih fungsi lahan perkebunan karet menjadi perkebunan buah, dikarenakan penurunan hasil (diganti dengan Sawit unggul dan Kakao)	Desa Wungkur Nanakan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur
2	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Menurunnya persentase lembaga desa yang dibina dalam upaya pembangunan desa	Pembinaan ke Desa-Desa Proklam, Sosialisasi, Pembagian Bibit dan Bak Sampah (1 Desa Rp 50.000.000)	Desa Mangkarap, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur
3	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Menurunnya persentase lembaga desa yang dibina dalam upaya pembangunan desa	Pembinaan ke Desa-Desa Proklam, Sosialisasi, Pembagian Bibit dan Bak Sampah (1 Desa Rp 50.000.000)	Desa Balawa, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur
4	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Belum optimalnya pengembangan industri berwawasan lingkungan dalam meningkatkan investasi industri	Penyusunan Dokumen Emisi Gas Rumah Kaca (1 Dokumen Rp 150.000.000)	Kab. Bartim, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur
5	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Tingginya alih fungsi lahan	Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (1 Paket Rp. 7.873.000.000)	Tamiang Layang, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur
6	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Belum optimalnya pengelolaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (1 Dokumen Rp. 150.000.000)	Tamiang Layang, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur
7	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Belum optimalnya pengelolaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat Kabupaten/Kota (Desa Mangkarap, Desa Balawa, Desa Muruduyung, Desa Tangkan, Desa Tampa 5 Desa Rp. 250.000.000)	Desa Mangkarap, Desa Balawa, Desa Muruduyung, Desa Tangkan, Desa Tampa, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur
8	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Belum optimalnya pengelolaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati (a. Kendaraan Roda 4 (Empat)/Pick Up 1 Unit, b. Mobil Ski Lift (Pemangkas Dahan Pohon 1 unit, Rp. 2.350.000.000)	Tamiang Layang, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur

No.	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Belum optimalnya pengelolaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (1 Paket Rp. 1.279.024.172)	Tamiang Layang, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur
10	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Belum optimalnya pengelolaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (1 Paket Rp. 10.530.000.000)	Tamiang Layang, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur
11	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pembudidayaan maggot untuk pengelolaan Sampah. (1 Paket)	Kec. Kapuas Hilir, Kel. Sei Pasah, , Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
12	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Alat transportasi pengangkut sampah (Tossa). 2 Unit	Kec. Kapuas Hilir, Kel. Sei Pasah, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
13	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pengadaan truk pengangkut sampah. (1 Unit)	Kec. Kapuas Hilir, Kel. Sei Pasah, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
14	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pembuatan bak sampah permanen. (1 Paket)	Kec. Kapuas Murung, Kel. Palingkau, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
15	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pengadaan truk pengangkut sampah. (1 Unit)	Kec. Kapuas Murung, Kel. Palingkau, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
16	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Alat Transportasi Pengangkut Sampah (Tossa). 1 Unit	Kec. Kapuas Murung, Kel. Palingkau, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
17	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Alat Transportasi Pengangkut Sampah (Tossa). 3 Unit	Kec. Basarang, Desa Pangkalan Rekan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
18	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pembangunan TPA untuk pembuangan Sampah. (1 Unit)	Kec. Basarang, Desa Pangkalan Rekan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
19	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pembuatan Bak Sampah Permanen. (15 Unit)	Kec. Basarang, Desa Pangkalan Rekan, Rt. 03,04,05,06 dan 07 , Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas

No.	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pengadaan Truk Pengangkut Sampah. (1 Unit)	Kec. Kapuas Tengah, Desa Hurung Pukung, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
21	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pengadaan Truk Pengangkut Sampah. (1 Paket)	Kec. Kapuas Tengah, Desa Pujon, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
22	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Alat Transportasi Pengangkut Sampah (Tossa). 1 Paket	Kec. Kapuas Tengah, Desa Pujon, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
23	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pembangunan TPA untuk pembuangan Sampah. (1 Unit)	Kec. Kapuas Tengah, Desa Pujon, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
24	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Taman Ramah Anak dengan Fasilitas WC, Wifi, CCTV, Tempat olahraga dan Pojok Baca. (1 Paket)	Kecamatan Timpah, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
25	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pengadaan Truk Pengangkut Sampah. (1 Unit)	Kec. Timpah, Desa Aruk, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
26	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pengadaan Truk Pengangkut Sampah. (1 Unit)	Kec. Timpah, Desa Timpah, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
27	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pembangunan Tempat Penampungan Akhir Sampa. (1 Paket)	Kec. Timpah, Desa Timpah, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
28	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Penanganan Sampah dilingkungan Sekolah SD. (1 Paket)	Kec. Timpah, Desa. Timpah, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
29	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Program Kampung Iklim. (1 Kegiatan)	Kec. Kapuas Hilir, Kel. Sei Pasah, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
30	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pembuatan Taman Ramah Anak/ Ruang Terbuka Hijau. (1 paket)	Kec. Selat, Kel. Selat Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
31	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Alat Transportasi Pengangkut Sampah (Tossa). 10 Unit	Kab. Kapuas, Kec. Selat, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
32	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pengadaan Truk Pengangkut Sampah. (2 Unit)	Kab. Kapuas, Kec. Selat, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas

No.	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pengadaan Truk Sampah 2 Unit x 700jt = 1,4M. Dibutuhkan dalam upaya penguatan pengelolaan persampahan	Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
34	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Kendaraan Roda 3 sebanyak 10 Unit x 50jt = 500 jt. Dibutuhkan dalam upaya penguatan pengelolaan persampahan	Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
35	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Belum optimalnya pengelolaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Masih Kurangnya armada Truk Amrol untuk mengangkut sampah ke TPA sebanyak 2 unit	Kelurahan Kasongan Baru, Kelurahan Kasongan Lama, dan Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Katingan
36	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Masih Kurangnya bak Amrol tempat pembuangan sampah sementara sebanyak 10 unit	Kel. Kasongan Baru, Kel. Kasongan Lama dan Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Katingan
37	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Masih Kurangnya Kendaraan roda 3 untuk mengangkut sampah rumah tangga ke TPS sebanyak 5 unit	Kel. Kasongan Baru Kel. Kasongan Lama dan Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Katingan
38	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	penurunan kualitas air	Pengadaan alat laboratorium untuk pengujian kualitas lingkungan (7 unit, Rp 2.120.000.000,-)	Jl. H.M. Rafi'i Nomor 169 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat
39	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	penurunan kualitas air	Pengadaan Sepeda Motor Operasional Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (4 unit, Rp 130.000.000,-)	Jl. H.M. Rafi'i Nomor 169 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat
40	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	penurunan kualitas air	Pengadaan mobil operasional pemantauan kualitas lingkungan (1 unit, Rp 550.000.000,-)	Jl. H.M. Rafi'i Nomor 169 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat

No.	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
41	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Tingginya alih fungsi lahan	Review Dokumen RPPLH (1 Dokumen, Rp 350.000.000,-)	Jl. H.M. Rafi'i Nomor 169 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat
42	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Tingginya alih fungsi lahan	Verifikasi Dokumen Review RPPLH (1 SK Verifikasi, Rp 50.000.000,-)	Jl. H.M. Rafi'i Nomor 169 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat
43	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	penurunan kualitas air	Pengadaan Alat Laboratorium untuk Pengujian Kualitas Lingkungan (7 Unit Pagu 2,120,000,000)	Kecamatan Arut Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat
44	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	penurunan kualitas air	Pengadaan Sepeda Motor Operasional Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (4 Unit Pagu 130,000,000)	Kecamatan Arut Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat
45	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	penurunan kualitas air	Pengadaan Mobil Operasional Pemantauan Kualitas Lingkungan (1 Unit Pagu 550,000,000)	Kecamatan Arut Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat
46	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Tingginya alih fungsi lahan	Belum adanya pelaksanaan kegiatan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK di Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp. 500.000.000	Jalan Jend. Sudirman KM. 6,7 Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur
47	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	penurunan kualitas air	Minimnya sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan berupa ruang laboratorium pengujian kualitas air seluas 180 m2 sebesar Rp 1.500 .000.000,-	Jalan Jend. Sudirman KM. 6,7 Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur
48	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	penurunan kualitas air	Belum adanya peralatan pengujian logam berat dan senyawa pencemaran kualitas air berupa Instrumen ICP atau AAS sebanyak 1 unit beserta alat penunjangnya sebesar Rp 2.300 .000.000,-	Jalan Jend. Sudirman KM. 6,7 Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur
49	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Tingginya alih fungsi lahan	Akibat tingginya alih fungsi lahan menyebabkan penurunan kualitas udara (Efek Gas Rumah Kaca) dimana peralatan pengujian beserta alat penunjangnya masih kurang yang memerlukan biaya sebesar Rp 1.500 .000.000,-	Jalan Jend. Sudirman KM. 6,7 Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur

No.	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50	SUNARDI,S.Si.,M.Sc.,M.Eng	Bappeda Kab/Kota	Tingginya alih fungsi lahan	Tingginya Alih Fungsi Lahan (Penyusunan Dokumen RPPEG/RPPLH)	Jl. Tijilik Riwut Km. 8.5 , Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Sukamara
51	SUNARDI,S.Si.,M.Sc.,M.Eng	Bappeda Kab/Kota	Tingginya alih fungsi lahan	Penyusunan Dokumen KEHATI (1 Dokumen)	Jl. Tjilik Riwut No. KM 8,5 Natai Sedawak Kec. Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Sukamara

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah, juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Agar penetapan prioritas pembangunan tepat sasaran dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional, maka perlu adanya penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Hasil dari pemetaan dan analisis korelasi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah tercantum pada tabel 3.1 dan 3.2 berikut

Tabel 3.1 Tema Rencana Kerja Daerah Tahun 2025

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025	Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Memantapkan Pembangunan Melalui Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat, Menuju Kalteng Unggul dan Bermartabat

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 berpedoman pada kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 dan diselaraskan dengan tema pembangunan prioritas provinsi yang disajikan pada tabel berikut

Tabel 3.2 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi
Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan

Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Provinsi tahun 2025, Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 mendukung secara langsung prioritas-prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Tengah.

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA-PD

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Berdasarkan dokumen Renstra telah ditetapkan tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

a. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
2. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

b. Sasaran

Untuk mencapai tujuan diatas, maka disusun sasaran yang ingin di capai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu:

1. Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
3. Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan.
4. Meningkatnya prosentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
7. Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan dimana memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran rincian kegiatan, pengurangan sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas.

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, tertuang dalam Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

**TABEL 3.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

URUSAN : : Urusan Wajib (Non Pelayanan Dasar) Lingkungan Hidup
PD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)	Keterangan	
							Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keterlaksanaan (%)		100%	35.423.963.027	38.750.000.000		
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD		9 Dokumen	474.750.872	940.000.000		
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	4 Dokumen	382.161.568	700.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	8.574.925	15.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	8.574.925	15.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	10.000.000	15.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	10.000.000	15.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	4 Laporan	42.420.958	150.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	1 Laporan	13.018.496	30.000.000	Lanjutan	DLH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)	Keterangan	
							Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan PD		100%	12.485.030.717	10.540.000.000		
2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palangka Raya	64 Orang/Bulan	12.462.879.675	10.500.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palangka Raya	1 Laporan	10.378.848	20.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kota Palangka Raya	2 Laporan	11.772.194	20.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		100%	34.289.419	80.000.000		
2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	16.438.566	30.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palangka Raya	1 Laporan	17.850.853	50.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian PD (%)		100%	2.023.174.271	2.615.000.000		
2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Palangka Raya	1 Paket	101.313.400	500.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	10.000.000	15.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Luar Provinsi	250 Orang	1.911.860.871	2.100.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum PD		100%	1.988.525.568	4.135.000.000		
2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palangka Raya	1 Paket	100.000.000	250.000.000	Lanjutan	DLH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)	Keterangan	
							Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palangka Raya	8 Paket	1.328.525.568	2.900.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palangka Raya	1 Paket	40.000.000	50.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	150.000.000	200.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palangka Raya	1 Laporan	25.000.000	30.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah dan Luar Provinsi	1 Laporan	315.000.000	650.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	30.000.000	55.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterlaksanaan pengadaan barang milik daerah		100%	11.498.410.792	12.800.000.000		
2.11.01.1.07.0002	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kota Palangka Raya	5 unit	3.600.000.000	3.950.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palangka Raya	5 Paket	175.000.000	450.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palangka Raya	6 Unit	7.673.410.792	7.900.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.07.0010	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palangka Raya	1 Unit	50.000.000	500.000.000		
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan PD		100%	2.794.000.000	3.165.000.000		
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palangka Raya	1 Laporan	10.000.000	15.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palangka Raya	1 Laporan	450.000.000	650.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palangka Raya	1 Laporan	2.334.000.000	2.500.000.000	Lanjutan	DLH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)	Keterangan	
							Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peresentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PD		100%	4.125.781.388	4.475.000.000		
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Palangka Raya	20 Unit	450.000.000	550.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palangka Raya	1 unit	2.865.781.388	3.100.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palangka Raya	1 Unit	810.000.000	825.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen rencana dan perlindungan di Bidang Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan		2 Dokumen	784.255.058	1.200.000.000		
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH		1 Dokumen	724.506.782	1.000.000.000		
2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	332.365.436	500.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.02.1.01.0004	Penyusunan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	392.141.346	500.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen KLHS		1 Dokumen	59.748.276	200.000.000		
2.11.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	Provinsi Kalimantan Tengah	6 Dokumen	37.875.898	125.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.02.1.02.0006	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	Provinsi Kalimantan Tengah	3 Dokumen	21.872.378	75.000.000	Lanjutan	DLH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)	Keterangan	
							Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	IKLH		74,97	10.406.294.679	14.375.000.000		
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup		10 Kegiatan	10.297.190.283	14.175.000.000		
2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Provinsi Kalimantan Tengah	2 Dokumen	380.183.589	650.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	113.785.134	200.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.03.1.01.0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Paket	34.448.381	75.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.03.1.01.0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	66.200.518	150.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.03.1.01.0008	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Provinsi Kalimantan Tengah	2 Laporan	800.475.312	1.000.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, udara dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Provinsi Kalimantan Tengah	12 Lokasi	237.412.254	350.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.03.1.01.0011	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	154.245.150	200.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.03.1.01.0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	29.789.474	50.000.000	Lanjutan	DLH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)	Keterangan	
							Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
2.11.03.1.01.0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Provinsi Kalimantan Tengah	15 Unit	7.452.984.500	10.300.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.03.1.01.0014	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Unit	390.239.252	450.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Provinsi Kalimantan Tengah	60 Dokumen	637.426.719	750.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan upaya penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup		1 Kegiatan	109.104.396	200.000.000		
2.11.03.1.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	109.104.396	200.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah dokumen profil Kehati		1 Dokumen	14.737.028.793	14.900.000.000		
2.11.4.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati provinsi		1 Kegiatan	14.737.028.793	14.900.000.000		
2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	13.102.545.120	13.150.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Hektar	128.095.286	200.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.04.1.01.0006	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekargaman hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Provinsi Kalimantan Tengah	50 Orang	1.506.388.387	1.550.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)		1.407.674,877 ton	560.250.704	1.125.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)	Keterangan	
							Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah usaha jasa pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		1 Usaha	560.250.704	1.125.000.000		
2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	3.349.177	550.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	556.901.527	575.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH		79%	1.368.139.064	2.925.000.000		
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi		162 Perusahaan	1.368.139.064	2.925.000.000		
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Provinsi Kalimantan Tengah	2 Dokumen	320.902.804	500.000.000	Lanjutan	DLH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)	Keterangan	
							Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
2.11.06.1.01.0005	Pengembangan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Provinsi Kalimantan Tengah	5 Orang	249.938.058	350.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Provinsi Kalimantan Tengah	162 Badan Usaha	769.148.000	2.000.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.06.1.01.0007	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Provinsi Kalimantan Tengah	9 Orang	28.150.202	75.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH		2 MHA	176.549.653	300.000.000		
2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang terbentuk, diakui dan menjalankan kearifan lokal serta pengetahuan tradisional yang terkait dengan PPLH		2 MHA	126.188.220	175.000.000		
2.11.07.1.01.0001	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	126.188.220	175.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		1 Kelompok Masyarakat	50.361.433	125.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)	Keterangan	
							Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	50.361.433	125.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan		2 Kegiatan	1.390.852.928	1.825.000.000		
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi		2 Kegiatan	1.390.852.928	1.825.000.000		
2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	223.723.250	650.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.08.1.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Provinsi Kalimantan Tengah	60 Orang	471.101.913	475.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Provinsi Kalimantan Tengah	2 Lembaga	696.027.765	700.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat		2 Penghargaan	476.588.333	650.000.000		
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang didapat oleh masyarakat/ lembaga masyarakatat/dunia usaha		2 Penghargaan	476.588.333	650.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)	Keterangan	
							Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
2.11.09.1.01.0001	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Provinsi Kalimantan Tengah	2 Entitas	476.588.333	650.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup		88%	1.068.676.433	1.750.000.000		
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah pengaduan yang ditangani		100%	1.068.676.433	1.750.000.000		
2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Perkara	109.141.268	200.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.10.1.01.0004	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Provinsi Kalimantan Tengah	12 Orang	244.887.654	350.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.10.1.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Perkara	247.302.486	350.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.10.1.01.0006	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Perkara	336.470.822	650.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	Provinsi Kalimantan Tengah	8 Pengaduan	130.874.203	200.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang		18.636,55 Ton	83.674.577.042	85.050.000.000		
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/ TPST Regional	Jumlah Kegiatan Penangan Sampah		1 Kegiatan	83.674.577.042	85.050.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)	Keterangan	
							Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	50.237.656	200.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	1.200.000.000	1.200.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.11.1.01.0012	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Unit	75.628.772.588	76.000.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.11.1.01.0013	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	Provinsi Kalimantan Tengah	866,03 ton	6.649.929.830	7.500.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	145.636.968	150.000.000	Lanjutan	DLH
JUMLAH					150.067.175.714	162.850.000.000		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun anggaran 2025 dan sekaligus merupakan referensi bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah yang berisikan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu indikatif.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah ini berisikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaannya serta kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan upaya keterpaduan dan sinergi dari elemen yang pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah baik sekretariat maupun bidang – bidang, demi mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan rapat koordinasi dan observasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan tahap berikutnya.

Adapun Perubahan Rencana Kerja berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan, output, outcome, pagu indikatif dan sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1 tentang Program, Kegiatan dan Sub kegiatan tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2025 dan tabel 4.2 Rincian Plafon Anggaran Perangkat Daerah Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2025.

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum pada Tabel 4.1 tentunya masih berupa rencana yang dapat mengalami perubahan pada realisasi tergantung pada beberapa faktor, misalnya menyesuaikan dengan kemampuan pembiayaan daerah, terbitnya peraturan perundangan yang mengganti peraturan yang berlaku saat ini, perubahan struktur organisasi dan lain sebagainya.

Adapun mengenai pelaksanaan program dan kegiatan, tentunya harus memiliki indikator yang dapat diukur dan hendaknya dilaksanakan oleh satu

bidang saja sehingga alur pertanggungjawaban keberhasilan program tersebut menjadi jelas. Oleh karena itu nantinya diperlukan pula penyesuaian nama program dan kegiatan agar tidak terjadi tumpang tindih antar bidang pelaksana dari program dan kegiatan tersebut.

Sesuai dengan kebijakan nasional, program dan kegiatan yang direncanakan tersebut secara langsung maupun tidak langsung pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup, baik melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta untuk meningkatkan tutupan vegetasi. Selain itu juga bertujuan untuk penurunan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan model sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan.

**Tabel 4.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2025										Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			a/b/c	1/2/3	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keterlaksanaan (%)	Persentase keterlaksanaan (%)			100%	100%	39.696.458.865	35.423.963.027	-4.272.495.838			100%	38.750.000.000			
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD			9 Dokumen	9 Dokumen	627.645.636	474.750.872	-152.894.764			9 Dokumen	940.000.000			
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	4 Dokumen	4 Dokumen	504.115.832	382.161.568	-121.954.264	APBD	APBD	1 Dokumen	700.000.000	Lanjutan	DLH	
2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	1 Dokumen	8.574.925	8.574.925	0	APBD	APBD	1 Dokumen	15.000.000	Lanjutan	DLH	
2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	1 Dokumen	8.574.925	8.574.925	0	APBD	APBD	1 Dokumen	15.000.000	Lanjutan	DLH	
2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	0	APBD	APBD	1 Dokumen	15.000.000	Lanjutan	DLH	
2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	0	APBD	APBD	1 Dokumen	15.000.000	Lanjutan	DLH	
2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	4 Laporan	4 Laporan	68.951.458	42.420.958	-26.530.500	APBD	APBD	3 Laporan	150.000.000	Lanjutan	DLH	
2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Laporan	1 Laporan	17.428.496	13.018.496	-4.410.000	APBD	APBD	1 Laporan	30.000.000	Lanjutan	DLH	

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2025									Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan PD	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan PD			100%	100%	12.488.950.717	12.485.030.717	-3.920.000			100%	10.540.000.000		
2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	64 Orang/Bulan	64 Orang/Bulan	12.462.879.675	12.462.879.675	0	APBD	APBD	63 Orang/Bulan	10.500.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Laporan	1 Laporan	12.688.848	10.378.848	-2.310.000	APBD	APBD	1 Laporan	20.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	2 Laporan	2 Laporan	13.382.194	11.772.194	-1.610.000	APBD	APBD	2 Laporan	20.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah			100%	100%	47.689.419	34.289.419	-13.400.000			100%	80.000.000		
2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	1 Dokumen	19.728.566	16.438.566	-3.290.000	APBD	APBD	1 Dokumen	30.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Laporan	1 Laporan	27.960.853	17.850.853	-10.110.000	APBD	APBD	1 Laporan	50.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian PD (%)	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian PD (%)			100%	100%	2.412.080.913	2.023.174.271	-388.906.642			100%	2.615.000.000		
2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	5 Paket	1 Paket	450.000.000	101.313.400	-348.686.600	APBD	APBD	1 Paket	500.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	0	APBD	APBD	1 Dokumen	15.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Luar Provinsi	Luar Provinsi	250 Orang	250 Orang	1.952.080.913	1.911.860.871	-40.220.042	APBD	APBD	10 Orang	2.100.000.000	Lanjutan	DLH

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2025									Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			a/b/c	1/2/3
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum PD	Persentase pelaksanaan administrasi umum PD			100%	100%	3.960.900.000	1.988.525.568	-1.972.374.432			100%	4.135.000.000		
2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Paket	1 Paket	200.000.000	100.000.000	-100.000.000	APBD	APBD	1 Paket	250.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	10 Paket	8 Paket	2.892.900.000	1.328.525.568	-1.564.374.432	APBD	APBD	1 Paket	2.900.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Paket	1 Paket	40.000.000	40.000.000	0	APBD	APBD	1 Paket	50.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	150.000.000	0	APBD	APBD	1 Dokumen	200.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	25.000.000	0	APBD	APBD	1 Laporan	30.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah dan Luar Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah dan Luar Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	600.000.000	315.000.000	-285.000.000	APBD	APBD	1 Laporan	650.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	1 Dokumen	53.000.000	30.000.000	-23.000.000	APBD	APBD	1 Dokumen	55.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterlaksanaan pengadaan barang milik daerah	Persentase keterlaksanaan pengadaan barang milik daerah			100%	100%	12.673.410.792	11.498.410.792	-1.175.000.000			100%	12.800.000.000		
2.11.01.1.07.0002	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	7 unit	5 unit	3.900.000.000	3.600.000.000	-300.000.000	APBD	APBD	1 Paket	3.950.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	5 Paket	5 Paket	400.000.000	175.000.000	-225.000.000	APBD	APBD	1 Unit	450.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	7 Unit	6 Unit	7.873.410.792	7.673.410.792	-200.000.000	APBD	APBD	1 Unit	7.900.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.01.1.07.0010	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Unit	1 Unit	500.000.000	50.000.000	-450.000.000	APBD	APBD	100%	500.000.000	Lanjutan	DLH

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2025										Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			a/b/c	1/2/3	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan PD	Persentase jasa penunjang urusan PD			100%	100%	3.110.000.000	2.794.000.000	-316.000.000			1 Laporan	3.165.000.000			
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	0	APBD	APBD	1 Laporan	15.000.000	Lanjutan	DLH	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Laporan	1 Laporan	600.000.000	450.000.000	-150.000.000	APBD	APBD	1 Laporan	650.000.000	Lanjutan	DLH	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000.000	2.334.000.000	-166.000.000	APBD	APBD	100%	2.500.000.000	Lanjutan	DLH	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peresentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PD	Peresentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PD			100%	100%	4.375.781.388	4.125.781.388	-250.000.000			20 Unit	4.475.000.000			
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	20 Unit	20 Unit	500.000.000	450.000.000	-50.000.000	APBD	APBD	1 unit	550.000.000	Lanjutan	DLH	
2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 unit	1 unit	3.065.781.388	2.865.781.388	-200.000.000	APBD	APBD	1 Dokumen	3.100.000.000	Lanjutan	DLH	
2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Unit	1 Unit	810.000.000	810.000.000	0	APBD	APBD	1 Dokumen	825.000.000	Lanjutan	DLH	
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen rencana dan perlindungan di Bidang Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Jumlah dokumen rencana dan perlindungan di Bidang Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan			2 Dokumen	2 Dokumen	917.117.008	784.255.058	-132.861.950			1 Dokumen	1.200.000.000			
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH	Jumlah dokumen RPPLH			1 Dokumen	1 Dokumen	812.782.732	724.506.782	-88.275.950			1 Dokumen	1.000.000.000			
2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	1 Dokumen	391.536.436	332.365.436	-59.171.000	APBD	APBD	1 Dokumen	500.000.000	Lanjutan	DLH	

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2025									Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						
2.11.02.1.01.0004	Penyusunan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/ muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang lintas administrasi	Jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/ muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang lintas administrasi	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	1 Dokumen	421.246.296	392.141.346	-29.104.950	APBD	APBD	1 Dokumen	500.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen KLHS	Jumlah dokumen KLHS			1 Dokumen	1 Dokumen	104.334.276	59.748.276	-44.586.000			3 Dokumen	200.000.000		
2.11.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/ kota yang dilakukan pembinaan	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/ kota yang dilakukan pembinaan	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	6 Dokumen	6 Dokumen	68.821.898	37.875.898	-30.946.000	APBD	APBD	3 Dokumen	125.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.02.1.02.0006	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	3 Dokumen	3 Dokumen	35.512.378	21.872.378	-13.640.000	APBD	APBD	74,97	75.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	IKLH	IKLH			74,97	74,97	11.644.386.787	10.406.294.679	-1.238.092.108			10 Kegiatan	14.375.000.000		
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup			10 Kegiatan	10 Kegiatan	11.494.716.391	10.297.190.283	-1.197.526.108			1 Dokumen	14.175.000.000		
2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	2 Dokumen	2 Dokumen	506.020.338	380.183.589	-125.836.749	APBD	APBD	1 Dokumen	650.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	1 Dokumen	151.124.634	113.785.134	-37.339.500	APBD	APBD	1 Paket	200.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.03.1.01.0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Paket	1 Paket	42.279.762	34.448.381	-7.831.381	APBD	APBD	1 Laporan	75.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.03.1.01.0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	1 Laporan	83.221.036	66.200.518	-17.020.518	APBD	APBD	12 Lokasi	150.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.03.1.01.0008	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	2 Laporan	2 Laporan	900.950.625	800.475.312	-100.475.313	APBD	APBD	1 Dokumen	1.000.000.000	Lanjutan	DLH

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2025										Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	1 Dokumen	350.000.000			Lanjutan	DLH	
2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, udara dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	12 Lokasi	12 Lokasi	273.965.507	237.412.254	-36.553.253	APBD	APBD	1 Dokumen	350.000.000	Lanjutan	DLH	
2.11.03.1.01.0011	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	1 Dokumen	161.475.150	154.245.150	-7.230.000	APBD	APBD	1 Unit	200.000.000	Lanjutan	DLH	
2.11.03.1.01.0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	1 Dokumen	32.264.474	29.789.474	-2.475.000	APBD	APBD	1 Unit	50.000.000	Lanjutan	DLH	
2.11.03.1.01.0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	15 Unit	15 Unit	8.270.000.000	7.452.984.500	-817.015.500	APBD	APBD	1 Dokumen	10.300.000.000	Lanjutan	DLH	
2.11.03.1.01.0014	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Unit	1 Unit	395.154.505	390.239.252	-4.915.253	APBD	APBD	1 Kegiatan	450.000.000	Lanjutan	DLH	
2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	60 Dokumen	60 Dokumen	678.260.360	637.426.719	-40.833.641	APBD	APBD	1 Laporan	750.000.000	Lanjutan	DLH	
2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan upaya penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah kegiatan upaya penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup			1 Kegiatan	1 Kegiatan	149.670.396	109.104.396	-40.566.000			1 Dokumen	200.000.000			
2.11.03.1.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	1 Laporan	149.670.396	109.104.396	-40.566.000	APBD	APBD	1 Kegiatan	200.000.000	Lanjutan	DLH	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah dokumen profil Kehati	Jumlah dokumen profil Kehati			1 Dokumen	1 Dokumen	14.747.511.793	14.737.028.793	-10.483.000			1 Dokumen	14.900.000.000			

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2025										Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	a/b/c	1/2/3					
2.11.4.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati provinsi	Jumlah kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati provinsi			1 Kegiatan	1 Kegiatan	14.747.511.793	14.737.028.793	-10.483.000			1 Hektar	14.900.000.000			
2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	1 Dokumen	13.102.545.120	13.102.545.120	0	DBH-DR	DBH-DR	50 Orang	13.150.000.000	Lanjutan	DLH	
2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Hektar	1 Hektar	138.578.286	128.095.286	-10.483.000	APBD	APBD	1 Unit	200.000.000	Lanjutan	DLH	
2.11.04.1.01.0006	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekargaman hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	50 Orang	50 Orang	1.506.388.387	1.506.388.387	0	DBH-DR	DBH-DR	1.407.674,877 ton	1.550.000.000	Lanjutan	DLH	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)			1.407.674,877 ton	1.407.674,877 ton	1.393.214.281	560.250.704	-832.963.577			1 Usaha	1.125.000.000			
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah usaha jasa pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah usaha jasa pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			1 Usaha	1 Usaha	1.393.214.281	560.250.704	-832.963.577			1 Dokumen	1.125.000.000			
2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/ Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/ Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/ Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/ Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	1 Dokumen	536.698.354	3.349.177	-533.349.177	APBD	APBD	1 Dokumen	550.000.000	Lanjutan	DLH	
2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	1 Dokumen	856.515.927	556.901.527	-299.614.400	APBD	APBD	79%	575.000.000	Lanjutan	DLH	

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2025									Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH			79%	79%	2.200.170.832	1.368.139.064	-832.031.768			162 Perusahaan	2.925.000.000		
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi			162 Perusahaan	162 Perusahaan	2.200.170.832	1.368.139.064	-832.031.768			3 Dokumen	2.925.000.000		
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	2 Dokumen	2 Dokumen	381.842.804	320.902.804	-60.940.000	APBD	APBD	5 Orang	500.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.06.1.01.0005	Pengembangan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	5 Orang	5 Orang	271.946.576	249.938.058	-22.008.518	APBD	APBD	162 Badan Usaha	350.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	162 Badan Usaha	162 Badan Usaha	1.507.230.000	769.148.000	-738.082.000	APBD	APBD	1 Orang	2.000.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.06.1.01.0007	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	9 Orang	9 Orang	39.151.452	28.150.202	-11.001.250	APBD	APBD	2 MHA	75.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH			2 MHA	2 MHA	216.084.111	176.549.653	-39.534.458			2 MHA	300.000.000		
2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang terbentuk, diakui dan menjalankan kearifan lokal serta pengetahuan tradisional yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang terbentuk, diakui dan menjalankan kearifan lokal serta pengetahuan tradisional yang terkait dengan PPLH			2 MHA	2 MHA	143.028.220	126.188.220	-16.840.000			1 Dokumen	175.000.000		

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2025									Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	a/b/c	1/2/3				
2.11.07.1.01.0001	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	1 Dokumen	143.028.220	126.188.220	-16.840.000	APBD	APBD	1 Kelompok Masyarakat	175.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	73.055.891	50.361.433	-22.694.458			1 Dokumen	125.000.000		
2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	1 Dokumen	73.055.891	50.361.433	-22.694.458	APBD	APBD	2 Kegiatan	125.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan			2 Kegiatan	2 Kegiatan	2.183.622.224	1.390.852.928	-792.769.296			2 Kegiatan	1.825.000.000		
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi			2 Kegiatan	2 Kegiatan	2.183.622.224	1.390.852.928	-792.769.296			1 Dokumen	1.825.000.000		
2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	1 Dokumen	631.001.330	223.723.250	-407.278.080	APBD	APBD	60 Orang	650.000.000	Lanjutan	DLH

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2025									Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						
2.11.08.1.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	60 Orang	60 Orang	466.381.129	471.101.913	4.720.784	APBD	APBD	1 Lembaga	475.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	2 Lembaga	2 Lembaga	1.086.239.765	696.027.765	-390.212.000	APBD	APBD	2 Penghargaan	700.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat			2 Penghargaan	2 Penghargaan	546.559.255	476.588.333	-69.970.922			2 Penghargaan	650.000.000		
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang didapat oleh masyarakat/ lembaga masyarakatat/dunia usaha	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang didapat oleh masyarakat/ lembaga masyarakatat/dunia usaha			2 Penghargaan	2 Penghargaan	546.559.255	476.588.333	-69.970.922			3 Entitas	650.000.000		
2.11.09.1.01.0001	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	5 Entitas	2 Entitas	546.559.255	476.588.333	-69.970.922	APBD	APBD	88%	650.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup			88%	88%	1.304.645.933	1.068.676.433	-235.969.500			100%	1.750.000.000		
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah pengaduan yang ditangani	Jumlah pengaduan yang ditangani			100%	100%	1.304.645.933	1.068.676.433	-235.969.500			100%	1.750.000.000		
2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/ kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/ kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Perkara	1 Perkara	149.041.268	109.141.268	-39.900.000	APBD	APBD	12 Orang	200.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.10.1.01.0004	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	12 Orang	12 Orang	280.327.654	244.887.654	-35.440.000	APBD	APBD	1 Perkara	350.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.10.1.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Perkara	1 Perkara	273.692.486	247.302.486	-26.390.000	APBD	APBD	1 Perkara	350.000.000	Lanjutan	DLH

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2025									Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
2.11.10.1.01.0006	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Perkara	1 Perkara	464.023.322	336.470.822	-127.552.500	APBD	APBD	1 Pengaduan	650.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	8 Pengaduan	8 Pengaduan	137.561.203	130.874.203	-6.687.000	APBD	APBD	18.636,55 Ton	200.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang			18.636,55 Ton	18.636,55 Ton	84.394.843.830	83.674.577.042	-720.266.788			1 Kegiatan	85.050.000.000		
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/ TPST Regional	Jumlah Kegiatan Penangan Sampah	Jumlah Kegiatan Penangan Sampah			1 Kegiatan	1 Kegiatan	84.394.843.830	83.674.577.042	-720.266.788			1 Dokumen	85.050.000.000		
2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	1 Dokumen	100.475.312	50.237.656	-50.237.656	APBD	APBD	1 Unit	200.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000.000	1.200.000.000	0	APBD	APBD	1 Dokumen	1.200.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.11.1.01.0012	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Unit	1 Unit	75.628.772.588	75.628.772.588	0	APBD DBH-DR	APBD DBH-DR	1 Unit	76.000.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.11.1.01.0013	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	866,03 ton	866,03 ton	7.256.325.909	6.649.929.830	-606.396.079	APBD	APBD	866,03 ton	7.500.000.000	Lanjutan	DLH
2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	1 Dokumen	209.270.021	145.636.968	-63.633.053	APBD	APBD	1 Dokumen	150.000.000	Lanjutan	DLH
JUMLAH								159.244.614.919	150.067.175.714	-9.177.439.205				162.850.000.000		

TABEL 4.2. RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERANGKAT DAERAH MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

URUSAN : Urusan Wajib (Non Pelayanan Dasar) Lingkungan Hidup
 PD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Plafon Anggaran (Rp)			Keterangan
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keterlaksanaan (%)	100%		39.696.458.865	35.423.963.027	-4.272.495.838	
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	9 Dokumen		627.645.636	474.750.872	-152.894.764	
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Palangka Raya	504.115.832	382.161.568	-121.954.264	
2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palangka Raya	8.574.925	8.574.925	0	
2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palangka Raya	8.574.925	8.574.925	0	
2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palangka Raya	10.000.000	10.000.000	0	
2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palangka Raya	10.000.000	10.000.000	0	
2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4 Laporan	Kota Palangka Raya	68.951.458	42.420.958	-26.530.500	
2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Palangka Raya	17.428.496	13.018.496	-4.410.000	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan PD	100%		12.488.950.717	12.485.030.717	-3.920.000	
2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/ Bulan	Kota Palangka Raya	12.462.879.675	12.462.879.675	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Plafon Anggaran (Rp)			Keterangan
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Palangka Raya	12.688.848	10.378.848	-2.310.000	
2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Kota Palangka Raya	13.382.194	11.772.194	-1.610.000	
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%		47.689.419	34.289.419	-13.400.000	
2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Palangka Raya	19.728.566	16.438.566	-3.290.000	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Palangka Raya	27.960.853	17.850.853	-10.110.000	
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian PD (%)	100%		2.412.080.913	2.023.174.271	-388.906.642	
2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Palangka Raya	450.000.000	101.313.400	-348.686.600	
2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Palangka Raya	10.000.000	10.000.000	0	
2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	250 Orang	Luar Provinsi	1.952.080.913	1.911.860.871	-40.220.042	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum PD	100%		3.960.900.000	1.988.525.568	-1.972.374.432	
2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palangka Raya	200.000.000	100.000.000	-100.000.000	
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kota Palangka Raya	2.892.900.000	1.328.525.568	-1.564.374.432	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Palangka Raya	40.000.000	40.000.000	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Plafon Anggaran (Rp)			Keterangan
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Palangka Raya	150.000.000	150.000.000	0	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Palangka Raya	25.000.000	25.000.000	0	
2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Provinsi Kalimantan Tengah dan Luar Provinsi	600.000.000	315.000.000	-285.000.000	
2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Palangka Raya	53.000.000	30.000.000	-23.000.000	
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterlaksanaan pengadaan barang milik daerah	100%		12.673.410.792	11.498.410.792	-1.175.000.000	
2.11.01.1.07.0002	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	5 unit	Kota Palangka Raya	3.900.000.000	3.600.000.000	-300.000.000	
2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	Kota Palangka Raya	400.000.000	175.000.000	-225.000.000	
2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kota Palangka Raya	7.873.410.792	7.673.410.792	-200.000.000	
2.11.01.1.07.0010	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Palangka Raya	500.000.000	50.000.000	-450.000.000	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan PD	100%		3.110.000.000	2.794.000.000	-316.000.000	
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Palangka Raya	10.000.000	10.000.000	0	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Palangka Raya	600.000.000	450.000.000	-150.000.000	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Palangka Raya	2.500.000.000	2.334.000.000	-166.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Plafon Anggaran (Rp)			Keterangan
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peresentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PD	100%		4.375.781.388	4.125.781.388	-250.000.000	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	Kota Palangka Raya	500.000.000	450.000.000	-50.000.000	
2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Kota Palangka Raya	3.065.781.388	2.865.781.388	-200.000.000	
2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Palangka Raya	810.000.000	810.000.000	0	
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen rencana dan perlindungan di Bidang Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	2 Dokumen		917.117.008	784.255.058	-132.861.950	
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH	1 Dokumen		812.782.732	724.506.782	-88.275.950	
2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	391.536.436	332.365.436	-59.171.000	
2.11.02.1.01.0004	Penyusunan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	1 Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	421.246.296	392.141.346	-29.104.950	
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen KLHS	1 Dokumen		104.334.276	59.748.276	-44.586.000	
2.11.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	6 Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	68.821.898	37.875.898	-30.946.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Plafon Anggaran (Rp)			Keterangan
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
2.11.02.1.02.0006	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	3 Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	35.512.378	21.872.378	-13.640.000	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	IKLH	74,97		11.644.386.787	10.406.294.679	-1.238.092.108	
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	10 Kegiatan		11.494.716.391	10.297.190.283	-1.197.526.108	
2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	506.020.338	380.183.589	-125.836.749	
2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	151.124.634	113.785.134	-37.339.500	
2.11.03.1.01.0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	1 Paket	Provinsi Kalimantan Tengah	42.279.762	34.448.381	-7.831.381	
2.11.03.1.01.0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan	Provinsi Kalimantan Tengah	83.221.036	66.200.518	-17.020.518	
2.11.03.1.01.0008	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	2 Laporan	Provinsi Kalimantan Tengah	900.950.625	800.475.312	-100.475.313	
2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, udara dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	12 Lokasi	Provinsi Kalimantan Tengah	273.965.507	237.412.254	-36.553.253	
2.11.03.1.01.0011	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	161.475.150	154.245.150	-7.230.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Plafon Anggaran (Rp)			Keterangan
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
2.11.03.1.01.0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	32.264.474	29.789.474	-2.475.000	
2.11.03.1.01.0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	15 Unit	Provinsi Kalimantan Tengah	8.270.000.000	7.452.984.500	-817.015.500	
2.11.03.1.01.0014	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	Provinsi Kalimantan Tengah	395.154.505	390.239.252	-4.915.253	
2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	60 Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	678.260.360	637.426.719	-40.833.641	
2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan upaya penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	1 Kegiatan		149.670.396	109.104.396	-40.566.000	
2.11.03.1.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	Provinsi Kalimantan Tengah	149.670.396	109.104.396	-40.566.000	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah dokumen profil Kehati	1 Dokumen		14.747.511.793	14.737.028.793	-10.483.000	
2.11.4.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati provinsi	1 Kegiatan		14.747.511.793	14.737.028.793	-10.483.000	
2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	13.102.545.120	13.102.545.120	0	
2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 Hektar	Provinsi Kalimantan Tengah	138.578.286	128.095.286	-10.483.000	
2.11.04.1.01.0006	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	50 Orang	Provinsi Kalimantan Tengah	1.506.388.387	1.506.388.387	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Plafon Anggaran (Rp)			Keterangan
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	1.407.674,877 ton		1.393.214.281	560.250.704	-832.963.577	
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah usaha jasa pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 Usaha		1.393.214.281	560.250.704	-832.963.577	
2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	536.698.354	3.349.177	-533.349.177	
2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	856.515.927	556.901.527	-299.614.400	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	79%		2.200.170.832	1.368.139.064	-832.031.768	
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi	162 Perusahaan		2.200.170.832	1.368.139.064	-832.031.768	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Plafon Anggaran (Rp)			Keterangan
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	2 Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	381.842.804	320.902.804	-60.940.000	
2.11.06.1.01.0005	Pengembangan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	Provinsi Kalimantan Tengah	271.946.576	249.938.058	-22.008.518	
2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	162 Badan Usaha	Provinsi Kalimantan Tengah	1.507.230.000	769.148.000	-738.082.000	
2.11.06.1.01.0007	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	9 Orang	Provinsi Kalimantan Tengah	39.151.452	28.150.202	-11.001.250	
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	2 MHA		216.084.111	176.549.653	-39.534.458	
2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang terbentuk, diakui dan menjalankan kearifan lokal serta pengetahuan tradisional yang terkait dengan PPLH	2 MHA		143.028.220	126.188.220	-16.840.000	
2.11.07.1.01.0001	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1 Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	143.028.220	126.188.220	-16.840.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Plafon Anggaran (Rp)			Keterangan
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	1 Kelompok Masyarakat		73.055.891	50.361.433	-22.694.458	
2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	73.055.891	50.361.433	-22.694.458	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	2 Kegiatan		2.183.622.224	1.390.852.928	-792.769.296	
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi	2 Kegiatan		2.183.622.224	1.390.852.928	-792.769.296	
2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	631.001.330	223.723.250	-407.278.080	
2.11.08.1.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	60 Orang	Provinsi Kalimantan Tengah	466.381.129	471.101.913	4.720.784	
2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2 Lembaga	Provinsi Kalimantan Tengah	1.086.239.765	696.027.765	-390.212.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Plafon Anggaran (Rp)			Keterangan
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	2 Penghargaan		546.559.255	476.588.333	-69.970.922	
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang didapat oleh masyarakat/ lembaga masyarakat/dunia usaha	2 Penghargaan		546.559.255	476.588.333	-69.970.922	
2.11.09.1.01.0001	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	2 Entitas	Provinsi Kalimantan Tengah	546.559.255	476.588.333	-69.970.922	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	88%		1.304.645.933	1.068.676.433	-235.969.500	
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah pengaduan yang ditangani	100%		1.304.645.933	1.068.676.433	-235.969.500	
2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/ kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	1 Perkara	Provinsi Kalimantan Tengah	149.041.268	109.141.268	-39.900.000	
2.11.10.1.01.0004	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	12 Orang	Provinsi Kalimantan Tengah	280.327.654	244.887.654	-35.440.000	
2.11.10.1.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	1 Perkara	Provinsi Kalimantan Tengah	273.692.486	247.302.486	-26.390.000	
2.11.10.1.01.0006	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	1 Perkara	Provinsi Kalimantan Tengah	464.023.322	336.470.822	-127.552.500	
2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	8 Pengaduan	Provinsi Kalimantan Tengah	137.561.203	130.874.203	-6.687.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Plafon Anggaran (Rp)			Keterangan
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang	18.636,55 Ton		84.394.843.830	83.674.577.042	-720.266.788	
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/ TPST Regional	Jumlah Kegiatan Penangan Sampah	1 Kegiatan		84.394.843.830	83.674.577.042	-720.266.788	
2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	100.475.312	50.237.656	-50.237.656	
2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	1.200.000.000	1.200.000.000	0	
2.11.11.1.01.0012	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	1 Unit	Provinsi Kalimantan Tengah	75.628.772.588	75.628.772.588	0	
2.11.11.1.01.0013	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	866,03 ton	Provinsi Kalimantan Tengah	7.256.325.909	6.649.929.830	-606.396.079	
2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1 Dokumen	Provinsi Kalimantan Tengah	209.270.021	145.636.968	-63.633.053	
JUMLAH					159.244.614.919	150.067.175.714	-9.177.439.205	

BAB V PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 ini merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2025 khususnya, dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program dan usulan masyarakat melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, di dalam implementasinya perlu dilengkapi dengan dokumen turunan ataupun dokumen pelengkap (Petunjuk Operasional, Kerangka Acuan Kerja dan lain- lain) agar lebih mudah dalam implementasi dan pengoperasionalannya serta lebih memudahkan dalam pengendalian dan evaluasi pencapaian target dan kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutannya. Dengan demikian tujuan utama untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat segera terwujud

Saran dan masukan terhadap Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RENJA) Tahun 2025 ini sangat kami harapkan, demi kesempurnaan dokumen ini.

Palangka Raya, 31 Juli 2025

KEPALA DINAS,



JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197606022005011010